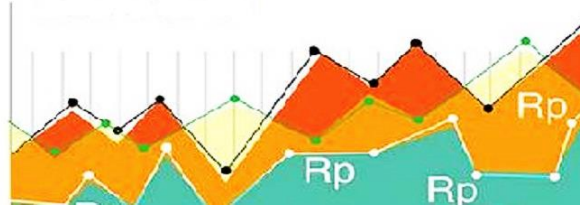


## Laporan Keuangan Diperiksa BPK

### Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Sumber: <https://www.kabar-banten.com/>

MUARA TEWEH - Kegiatan tahun 2018 sudah dilaksanakan, baik kegiatan fisik maupun kegiatan keuangan. Karena itu, Bupati Nadalsyah mengingatkan kepada jajarannya untuk memperhatikan jadwal pemeriksaan regular Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Barito Utara dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Audit intern akan dilaksanakan selama 30 hari, mulai 6 Februari sampai 8 Maret. Audit terperinci akan dilaksanakan sekitar April mendatang.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan atas LKPD Batara tahun 2018, saya minta beberapa hal untuk diperhatikan dan dilaksanakan,” ujar Nadalsyah, Senin(4/2).

Di antaranya, mempersiapkan dan menyampaikan permintaan data untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan surat permintaan dari tim BPK RI yang mana pada saat pelaksanaan pemeriksaan akan dibagikan kepada seluruh perangkat daerah (PD).

Lalu, mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung atau dokumen sumber sebagai bahan kerja dalam penyusunan laporan keuangan PD dan laporan keuangan Pemkab. Antara lain, data yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo.

“Saya minta juga untuk menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan Keuangan PD dan menyampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 28 Februari 2019,” tandasnya.

Semua kepala PD, imbau bupati, agar tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah kecuali mendapatkan izin pimpinan serta sudah berkoordinasi kepada tim BPK RI untuk kelancaran proses pemeriksaan, kecuali kegiatan yang akan dilaksanakan memang tidak bisa diwakilkan.

“Untuk kelengkapan administrasi maka saya perintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan DPA-SKPD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Batara, paling lambat akhir Januari,” cetusnya.

Hal ini, agar laporan yang disampaikan dibisa direkap dan selanjutnya bisa di jadikan laporan keuangan Pemkab kepada BPK.

Mengingat, pelaporan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menciptakan tata pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean governance*) serta untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke lima kalinya. **(dad/ram).**

### **Sumber :**

Kalteng Pos, Rabu 6 Februari 2019, hal 27.

Kalteng Pos, Selasa 12 februari 2019, hal 23.

<https://kalteng.antaranews.com/berita/299706/bpk-ri-jadwalkan-audit-laporan-keuangan-pemkab-barito-utara>

<https://www.borneonews.co.id/berita/116304-pemkab-barito-utara-lakukan-entry-meeting-bersama-bpk-ri>

<https://www.muttaqin.id/2018/08/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-jenis-unsur.html>

### **Catatan :**

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP). Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota.

Jenis atau komponen laporan keuangan pemerintah daerah jika kita mengacu pada PSAP Nomor 1, maka komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan pemerintah terdiri dari 2 hal, yaitu laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah antara lain : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada 7 jenis laporan keuangan pemerintah, baik itu laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota). Untuk lebih mendalami masing-masing jenis laporan keuangan pemerintah, berikut ini akan kita kaji satu persatu.

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan pemerintah yang pertama yaitu Laporan Realisasi Anggaran atau disingkat LRA. LRA berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010, adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam Satu periode pelaporan.

#### 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Sama halnya jenis laporan keuangan pemerintah di atas, bahwa semua jenis laporan keuangan pemerintah yang kami sajikan ini berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Dalam kaitannya dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, laporan ini merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 3. Neraca

Jenis laporan keuangan pemerintah yang ketiga yaitu laporan neraca. Neraca (PP nomor 71 tahun 2010 ) merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu.

Di dalam laporan neraca, ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya, antara lain : aset, kewajiban, dan ekuitas.

#### 4. Laporan Operasional

Menurut PP nomor 71 tahun 2010, laporan operasional adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/ daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sama halnya jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional, terdapat beberapa unsur laporan, antara lain : pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

#### 5. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan PSAP Nomor 1, Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya Pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus atau defisit hello pada periode bersangkutan
- c. Koreksi- koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar .

#### 6. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010, CALK merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang nenuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan peribahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, da laporan aruas kas.

Selain itu, jenis laporan keuangan pemerintah ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.